

**PERAN PENGHULU DALAM PENGANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KAMPUNG BERBASIS EKOLOGI DI KAMPUNG SUAK LANJUT  
KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

MUHAMMAD RAFDIANSYAH

NPP. 29.0963

*Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau  
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email: Rafdiansyah24@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *As the only district that focuses and is committed to realizing environmental conservation, the Siak Regency government is committed to trying to improve the environment and natural resource management in the Siak Regency area. Although the funds are limited. One of them is improving forest governance and conservation as well as environmental protection and preservation. With that, the researcher conducted a study entitled "The Role of Penghulu in Budgeting the Ecology-Based Village Revenue and Expenditure Budget in Suak Lanjut Village, Siak District, Siak Regency, Riau Province". Purpose:* This study intends to obtain a description of the role of the Penghulu in designing, implementing and evaluating the Ecology-based Village Revenue and Expenditure Budget, as well as knowing the inhibiting and supporting factors, and the efforts made in overcoming the inhibiting factors and encouraging the community to participate in programs and activities. a village that has environmental elements. **Method:** This study uses a form of qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. The theory used is the Role Theory by Soerjono Soekanto, there are three dimensions, namely norms, individuals to society, organizations and behavior. Data collection techniques using interviews and documentation. With data processing instruments using data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** The results showed that the role of the penghulu in the ecological-based APB-Kampung went well, with the existence of the ecology-based APB-Kampung, Suak Continued Village received additional incentive funds from the district in the form of TAKE funds. The inhibiting factor is in the capabilities and qualifications of human resources owned by the Suak Advanced Village Government. still not in accordance with the existing needs and public awareness in participating in the implementation of village programs and activities. In the RAPB, the ecology-based village is also not specifically mentioned as the Village RAPB, it is only included in policies related to the environment, so if it turns out that the village government cannot make environmental-based policies or programs will not receive TAKE funds. **Conclusion:** Then the researcher put forward several suggestions, including the Suak Continue Village Government to further improve the ecological elements in its government and the Penghulu should have more influence because the Penghulu is the head of the village government.

**Keywords:** *Role of Penghulu, Ecology-based Village Budget, TAKE Fund*

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Sebagai satu – satunya kabupaten yang fokus dan berkomitmen dalam upaya mewujudkan pelestarian lingkungan dan pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk berusaha memperbaiki lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Siak. Meskipun dana yang ada terbatas. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola dan pelestarian hutan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Dengan

itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Peran Penghulu Dalam Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Berbasis Ekologi Di Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau**”. **Tujuan:** Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh deskripsi tentang Peran Penghulu dalam melakukan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang berbasis Ekologi, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat dan mendorong masyarakat turut berpartisipasi pada program dan kegiatan kampung yang memiliki unsur lingkungan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teori yang digunakan ialah Teori Peran oleh Soerjono Soekanto, terdapat tiga dimensi yaitu norma-norma, individu terhadap masyarakat organisasi dan perilaku. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dengan instrumen pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Hasil penelitian bahwa peran penghulu dalam APBKampung berbasis ekologi berjalan baik, dengan adanya APBKampung berbasis ekologi telah membuat Kampung Suak Lanjut mendapatkan dana insentif tambahan dari kabupaten berupa dana TAKE. Faktor penghambat bahwa dalam kemampuan dan kualifikasi pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung Suak Lanjut. masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kesadaran masyarakat dalam turut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan kampung Dalam RAPB Kampung berbasis ekologi juga tidak secara khusus disebutkan sebagai RAPBKampung, hanya dimasukkan ke dalam kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan, jadi jika ternyata pemerintah kampung tidak dapat membuat kebijakan atau program berbasis lingkungan maka tidak akan mendapatkan dana TAKE. **Kesimpulan:** Kemudian peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain Pemerintah Kampung Suak Lanjut lebih meningkatkan lagi unsur ekologi pada pemerintahannya dan Penghulu harus lebih memiliki pengaruh dikarenakan penghulu sebagai kepala pemerintahan kampung.

**Kata Kunci: Peran Penghulu, APBKampung berbasis Ekologi, Dana TAKE**

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Kabupaten Siak merupakan satu – satunya kabupaten yang fokus dan berkomitmen dalam upaya mewujudkan pelestarian lingkungan dan pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk berusaha memperbaiki lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam yang berada di wilayah Kabupaten Siak. Salah satunya adalah perbaikan tata kelola dan pelestarian hutan serta perlindungan dan pelestarian lingkungan. Hal ini diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Hijau (Siak 2018), turunan dari Perbup nomor 22 tahun 2018 pemerintah Siak telah mengeluarkan peta jalan (*roadmap*) melalui keputusan bupati No. 650 tahun 2019. Tertuang di dalam peta jalan (*roadmap*) Kabupaten Siak Hijau, di dalam peta jalan (*roadmap*) tersebut disebutkan diperlukan peran pemerintah desa/ kampung dalam mengoptimalkan penggunaan dana kampung sesuai dengan kewenangan lokal skala kampung, sebagai inisiatif oleh kampung-kampung yang berkontribusi dalam pencapaian Siak hijau, termasuk dukungan dan program yang telah dialokasikan dari APBKampung (Siak and Sedagho Siak 2019). Hal tersebut sejalan dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan karakteristik pembangunan yang pro terhadap lingkungan berkelanjutan. Berkat partisipasi dan keberhasilan kampung Suak Lanjut dalam penerapan anggaran APBKampung berbasis ekologi tersebut, pada tahun pertama kampung Suak Lanjut telah mendapatkan dana insentif tambahan (TAKE) dari pemerintah kabupaten untuk anggaran APBKampung 2021 yang sedang berjalan akan tetapi dana yang diterima dari pemerintah kabupaten relatif kecil sehingga berpengaruh terhadap skor penilaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Persoalan yang muncul dalam penganggaran APBKampung Suak Lanjut, oleh sebab itu kendala yang dihadapi oleh

kampung Suak lanjut ialah, terjadinya defisit anggaran APBKampung yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diberikan oleh Kabupaten Siak sebesar 8,6% sehingga program program kampung yang ada terkendala dikarenakan pembiayaan program yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan yang tersisa hanya anggaran untuk biaya gaji dan penyelenggaraan pemerintah dan anggaran tersebut dialihkan untuk bantuan kepada warga yang terdampak covid-19. Dikarenakan luas wilayah termasuk kecil dan berbatasan dengan daerah ibukota kabupaten, program lingkungan dan penghijauan tidak berjalan dengan semestinya seperti dalam rangka HUT Provinsi Riau ke 64, Dinas kehutanan Provinsi Riau memberikan Bantuan sebanyak 1000 Pohon tetapi hanya 100 batang pohon yang bisa ditanamkan mengingat luas wilayah yang kecil. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait peranan penghulu dalam penganggaran APBKampung berbasis ekologi seperti penanggulangan bencana dan pelestarian lingkungan yang berjudul “Peran Penghulu dalam Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Berbasis Ekologi di Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak Kabupaten Siak”

## **I.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan APBKampung berbasis ekologi di suak lanjut, yaitu dalam penerapan anggaran APBKampung berbasis ekologi tersebut, pada tahun pertama kampung Suak Lanjut telah mendapatkan dana insentif tambahan (TAKE) dari pemerintah kabupaten untuk anggaran APBKampung 2021 yang sedang berjalan akan tetapi dana yang diterima dari pemerintah kabupaten relatif kecil sehingga berpengaruh terhadap skor penilaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Persoalan yang muncul dalam penganggaran APBKampung Suak Lanjut, oleh sebab itu kendala yang dihadapi oleh kampung Suak lanjut ialah, terjadinya defisit anggaran APBKampung yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang diberikan oleh Kabupaten Siak sebesar 8,6% sehingga program program kampung yang ada terkendala dikarenakan pembiayaan program yang berasal dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan yang tersisa hanya anggaran untuk biaya gaji dan penyelenggaraan pemerintah dan anggaran tersebut dialihkan untuk bantuan kepada warga yang terdampak covid-19. Dikarenakan luas wilayah termasuk kecil dan berbatasan dengan daerah ibukota kabupaten, program lingkungan dan penghijauan tidak berjalan dengan semestinya seperti dalam rangka HUT Provinsi Riau ke 64, Dinas kehutanan Provinsi Riau memberikan Bantuan sebanyak 1000 Pohon tetapi hanya 100 batang pohon yang bisa ditanamkan mengingat luas wilayah yang kecil. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga menjadi perhatian.

## **I.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik pada konteks penggunaan anggaran maupun peran kepala kampung(kepala desa) , penelitian Waniarsih yang berjudul Peran Kepala Desa Dalam Merealisasikan Penggunaan Anggaran Dana Desa(Studi Kasus Desa Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat 2009 – 2015, ini menemukan bahwa alokasi penggunaan dana desa lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur desa sedangkan dalam pembinaan masyarakat dan dalam bidang pemberdayaan masyarakat pernah diadakan pelatihan kelompok tani pada tahun 2014 dan dalam perencanaan dan tujuan dana desa belum sesuai dengan tujuan tiga aspek dalam penggunaan dana desa. Karena tidak semua program terealisasi dengan baik. (Waniarsih, 2017). Penelitian Mardiatul Ulfa. (Mardiatul Ulfa, 2019) menemukan bahwa adanya hambatan kepala desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa sehingga perlu adanya evaluasi agar hasil bisa lebih baik terutama pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Berdasarkan penelitian dwi cahya menemukan bahwa mekanisme peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa sudah sesuai dan menunjukkan

adanya kemajuan seiring berkembangnya waktu dan kebutuhan masyarakat terlihat sejak 2017 sejak masuknya dana desa (Dwi Cahya, 2019).

#### **I.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

penelitian di terdahulu yang peneliti gunakan pada dasarnya mempunyai kesamaan konsep dengan penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti. Dimana terdapat kesamaan terkait peran kepala desa pada penggunaan anggaran. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini ialah terkait peneliti ingin mengetahui dan menganalisa peran kepala kampung dalam penganggaran APBKampung Suak Lanjut yang berbasis Ekologi, dari segi metode yang digunakan juga memiliki perbedaan dan tidak sama dengan penelitian terdahulu yang dijadikan acuan.

#### **I.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran, kendala yang dihadapi serta upaya yang penghulu dalam penganggaran APBKampung berbasis Ekologi di Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak. Kabupaten Siak.

### **II. METODE**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang pola pikirnya menggunakan kuantitatif deduktif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapat pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, bukan hanya mendeskripsikan saja. Peneliti melakukan analisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman terhadap suatu masalah. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi dan situasi atau berbagai fenomena yang terjadi pada objek penelitiannya dan berupaya menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas” (Sugiyono 2017). Dalam metode deskriptif juga memaparkan hubungan dan memberikan makna serta penyelesaian terhadap masalah yang ada bukan hanya untuk menggambarkan dan menganalisa saja. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif diharap dapat menggambarkan suatu kondisi nyata yang terjadi dilapangan dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang diperoleh hasil dari wawancara dan teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung**

Berdasarkan wawancara dengan penghulu Kampung Suak Lanjut, pengelolaan keuangan dan anggaran dana kampung telah semua disesuaikan dengan pedoman yang diberikan oleh pemerintah pusat. Berikut penuturan Bapak Ilyas, Penghulu Kampung Suak Lanjut: Untuk pedoman pengelolaan itu semua kan sudah ada di atur dari pemerintah, kita tinggal mengikuti pedoman yang ada. Termasuk langkah – langkah apa yang harus diprioritaskan. Kalo gak sesuai nanti kan dari tingkat kecamatan pasti dibalikin, minta direvisi gitu. Yang pada dasarnya, kita ikut menjalankan sesuai peraturan kabupaten, yaitu membuat kebijakan dan program yang berlandaskan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya Bapak Rohim, Kerani Kampung Suak Lanjut menambahkan bahwa: Pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Bab 5 pasal 45 ayat 1 dan 2. Jadi kita acuannya dari situ aja. Disana sudah dijelaskan dengan sejelas – jelasnya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diberikan pemerintah.

### **3.2 Kesesuaian dengan Kebijakan Kabupaten Suak Lanjut**

Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau Dalam Ketentuan Umum Bab I pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa “Kabupaten Hijau adalah kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam (sda) dan peningkatan ekonomi masyarakat”, program yang dilaksanakan selain bertujuan untuk lingkungan juga sejalan dengan usaha meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah kampung dalam pelaksanaan programnya telah sesuai kebijakan pemerintah kabupaten tentang peningkatan perekonomian masyarakat yang sejalan dengan lingkungan hidup. Dalam tabel tersebut juga dengan jelas alokasi kegiatan budidaya masyarakat dengan alokasi biaya yang rinci berdasarkan pos masing – masing. Selanjutnya Bapak Rohim, Kerani Kampung menambahkan bahwa: Setiap kegiatan yang dilakukan pada akhirnya adalah memberi manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk masalah biasa, semua sudah ada dari pemerintah jadi kami bersama masyarakat tinggal menjalankan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil wawancara dan bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa sejauh ini berbagai kebijakan dan program kampung telah dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah Kabupaten Siak.

### **3.3 Peran Penghulu Penganggaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Berbasis Ekologi Di Kampung Suak Lanjut Kecamatan Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau**

Dana kampung adalah dana yang diberikan kepada pemerintah desa atau kampung yang berasal dari APBN yang disahkan oleh undang – undang, dana desa diberikan dengan tujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan lebih baik yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa berbasis ekologi menjadi agenda penting pemerintah sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya alam bagi masa depan. Khusus untuk Provinsi Riau, permasalahan lingkungan yang dihadapi adalah kerusakan lingkungan berupa kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tebal dan mengganggu kesehatan, berkurangnya lahan gambut, penebangan hutan serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan hidup Kabupaten Siak, berbagai upaya pelestarian lingkungan harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil yang dapat dilakukan oleh setiap individu masyarakat. Program pelestarian lingkungan diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dengan adanya program TAKE dapat diartikan sebagai *reward* pemerintah yang diharapkan dapat mendukung berbagai kebijakan berbasis lingkungan, meningkatkan badan usaha milik kampung yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program pelestarian lingkungan ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang akan berpengaruh terhadap kehidupan manusia untuk jangka waktu panjang, program kebijakan tersebut mencakup perlindungan dan pengelolaan hutan guna mencegah kebakaran hutan, rotasi lahan gambut serta mengembangkan berbagai kegiatan usaha berbasis lahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa program peningkatan perekonomian masyarakat kampung harus sejalan dengan pelestarian lingkungan berkelanjutan. Kampung Suak lanjut merupakan kampung dengan lahan yang cukup kecil, lokasi kampung dekat dengan kota namun jauh dengan pabrik industri. Berdasarkan keterangan narasumber, tidak terjadi kerusakan lingkungan di kampung tersebut. Dana TAKE yang diterima pemerintah kampung, diatur dan dianggarkan untuk membiayai APBKampung (DK & ADK) yang dijalankan sesuai kewenangan penghulu. Anggaran penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan fasilitas pembangunan desa yang berdampak pada lingkungan seperti

pemetaan desa, fasilitas Perhutanan Sosial (PS), penyusunan tata ruang desa, penyelesaian konflik lahan, ekowisata, rehabilitasi lahan desa, pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau, pembinaan masyarakat serta membiayai kegiatan lainnya yang relevan dengan program perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung berbasis ekologi ini memberikan manfaat bagi kampung yang memegang prinsip lingkungan dalam menentukan penggunaan anggarannya, penulis menemukan temuan penting yakni sebagai system pemerintahan terkecil yang kepala daerahnya dipilih langsung oleh masyarakat sehingga kampung bisa membuat kebijakan sendiri meskipun berseberangan dengan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Ini merupakan salah satu kelemahan dari berjalannya apbkampung berbasis ekologi dikarenakan ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah setempat sehingga tidak diwajibkan untuk menjadi kebijakan wajib bagi pemerintah kampung atau desa.

### **3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Peneliti menemukan adanya factor penghambat seperti Faktor penghambat bahwa dalam kemampuan dan kualifikasi pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung Suak Lanjut. masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kesadaran masyarakat dalam turut serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan kampung Dalam RAPB Kampung berbasis ekologi juga tidak secara khusus disebutkan sebagai RAPBKampung, hanya dimasukkan ke dalam kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan, jadi jika ternyata pemerintah kampung tidak dapat membuat kebijakan atau program berbasis lingkungan maka tidak akan mendapatkan dana TAKE.

## **IV. KESIMPULAN**

Penghulu kampung Suak lanjut menjalankan fungsi dan perannya sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan terkait APBKampung. Dalam pelaksanaannya, penghulu bekerja sama secara terintegrasi dengan berbagai unsur kampung, penyusunan anggaran dan program kegiatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dengan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas kampung. Selain itu, pemerintah kampung juga selalu berusaha mengakomodir usulan masyarakat, aparat kampung dan pihak terkait lainnya. Adapun pelaksanaan program, kampung melakukan kegiatan dengan prinsip gotong royong dan partisipan dengan diawasi dan dibimbing oleh pejabat dari kecamatan dan perhutani.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kampung saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja kampung kampung Suak Lanjut untuk bisa menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Ilyas (Penghulu Kampung Suak Lanjut) dan Bapak Drs. L. Budhi Yuwono, M. Si, (Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Barbara, K. (2015). *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*. Jakarta : Gunung Agung.

Soekanto. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto. (2009). Sosiologi Sebagai Pengantar. In soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (pp. 212-213). Jakarta: Raja Grafindo.

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Edisi Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

LANTAEDA, S. B. (2018). PERAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN. *Jurnal Administrasi Publik*, 1-9.

Siak, Pemerintah Kabupaten, and Sedagho Siak. 2019. "Peta Jalan Siak Kabupaten Hijau Peta Jalan Siak Menuju Kabupaten Hijau." 87.

Siakkab. (2015, Oktober 20). *siakkab.go.id*. Retrieved Oktober 7, 2021, from <https://web.siakkab.go.id/apb-kampung-disusun-transparan/>

cakaplah.com. n.d. "67 Kampung Sudah Dapat Dana Insentif Program TAKE Siak." Retrieved (<https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/5578/2021/02/10/67-kampung-sudah-dapat-dana-insentif-program-take-siak#sthash.uLh5LEc9.dpbs>).

Siak, Pemerintah Kabupaten. 2015. *Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung*.

Siak, Pemerintah Kabupaten. 2018. *Peraturan Bupati Siak Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Siak Kabupaten Hijau*.